

**EFEKTIVITAS LAYANAN PELAPORAN PELANGGARAN MELALUI WEBSITE  
WHISTLEBLOWING SYSTEM PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
WAJO (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo)**

Andi Fadli Alfahrezi

NPP. 30.1285

*Asdaf Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan*

*Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email: 30.1285@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing: Drs. Helianus Rudianto, M.Si

**ABSTRACT**

**Problems Statement/Background (GAP):** The development of information technology is very fast, this is also used by the government in developing information systems in government. The Website Whistleblowing System is a website for reporting violations by the state civil apparatus, which is one example of the use of information technology in government. On this website there is only one report that has entered from 2021 until now. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the goals of implementing the website whistleblowing system in Wajo Regency are achieved, to find out how the implementation of the website whistleblowing system program in Wajo Regency is integrated, to find out how to implement the website whistleblowing system program in Wajo Regency. **Method:** This research was conducted using a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out using interview, observation, and documentation techniques and analyzed using data triangulation. **Results:** the WBS website is still not effective. This can be proven by the fact that conditions have not been created whereby employees who are aware of violations are willing to report them, security and safety guarantees for complainants are still not properly guaranteed, and the regional inspectorate is still not ready to provide alternatives other than this website. **Conclusion:** The whistleblowing system website has been running with a clear legal basis, but it is still not effective because in achieving the target of implementing the whistleblowing system website it is still not the best choice to make a complaint because even though there are reports of violations handled by the Inspectorate, these violations originate from the door others though the website whistleblowing system has been running for two years.

**Keywords:** Violation, Technology, Whistleblowing system

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Perkembangan teknologi informasi sangatlah cepat, hal ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengembangkan sistem informasi pada pemerintahan. Website Whistleblowing System adalah website untuk melaporkan pelanggaran aparatur sipil Negara merupakan salah satu contoh pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan. Pada website ini hanya terdapat satu laporan yang masuk dari tahun 2021 hingga sekarang. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pencapaian tujuan dari pelaksanaan website whistleblowing system Kabupaten Wajo, Untuk mengetahui bagaimana integrasi pelaksanaan program website whistleblowing system Kabupaten Wajo, Untuk mengetahui bagaimana dalam pelaksanaan program website whistleblowing system Kabupaten Wajo. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan triangulasi data. **Hasil/Temuan:** website WBS ini

masih belum efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum terciptanya kondisi yang membuat pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran mau untuk melaporkannya, keamanan dan jaminan keselamatan pelapor masih belum terjamin dengan baik, dan masih belum siapnya inspektorat daerah dalam memberikan alternatif lain selain website ini. **Kesimpulan:** Website whistleblowing system sudah berjalan dengan landasan hukum yang jelas, namun masih belum efektif karena pada pencapaian target pelaksanaan website whistleblowing system ini masih belum menjadi pilihan terbaik untuk dijadikan tempat pengaduan dikarenakan meskipun adanya laporan pelanggaran yang ditangani oleh Inspektorat tetapi pelanggaran tersebut berasal dari pintu lain meskipun website whistleblowing system sudah berjalan dua selama tahun.

**Kata Kunci :** Pelanggaran, Teknologi, *Whistleblowing system*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara selaku penyelenggara pemerintahan memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan dari negara. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan secara optimal apabila ASN tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Terbukti bila ASN melakukan tindakan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi maka sudah sangat jelas jika hal tersebut tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu ASN bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pelanggaran hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam berperilaku Aparatur Sipil Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.01/2018 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Apabila seorang aparatur melakukan korupsi maka akan terhitung sebagai pelanggaran yang merugikan pemerintah atau negara..

Korupsi adalah segala macam bentuk penyalahgunaan dana dari sebuah organisasi oleh pemegang kekuasaan baik itu negara, perusahaan, dan lainnya, untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Tindakan korupsi ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti minimnya nilai moralitas dari individu yaitu kurangnya rasa malu, lemahnya pondasi iman juga kejujuran. Sedangkan faktor eksternal berasal dari berbagai faktor yaitu faktor sosial, hukum, ekonomi, dan politik. Bagi negara sendiri, korupsi adalah tindakan yang merugikan negara. Korupsi dapat mengakibatkan melonjaknya ketimpangan pendapatan, menurunnya investasi, meningkatkan angka kemiskinan, hingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dari suatu negara.

Sistem Pelaporan Pelanggaran(SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018 adalah mekanisme pelaporan pelanggaran yang dibuat untuk memudahkan bagi siapapun yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Salah satu tujuan dari pembuatan layanan pelaporan ini adalah untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran pada organisasi melalui deteksi dini. Pengungkapan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor pada umumnya dilakukan secara rahasia dengan tujuan yang baik yaitu mencegah terjadinya praktik korupsi. Pelapor dalam hal ini disebut sebagai *whistleblower*.

Pelanggaran-pelanggaran yang dapat diproses oleh inspektorat pada website wbs diantaranya adalah gratifikasi dan pungutan liar merupakan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai kasus korupsi, untuk penyimpangan dari tugas fungsi merupakan pelanggaran Aparatur Sipil Negara yang terjadi akibat kurangnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang tugas dan fungsi masing-masing, serta memahami regulasi tentang kedudukannya sebagai ASN sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan,



melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN ketika aparat melakukan hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan aturan yang berlaku seperti melakukan tindak pidana korupsi, melakukan pelecehan seksual, dan melakukan tindak kekerasan, benturan kepentingan adalah merupakan situasi ketika aparat memiliki kepentingan pribadi atau lainnya yang dapat memengaruhi kinerja atau profesionalitas pada lingkungan kerja, laporan lainnya merupakan laporan pelanggaran ASN yang masuk tapi tidak termasuk pada kategori pelanggaran yang ditampilkan. Jumlah dari laporan yang diterima oleh website ini membuat penulis tertarik untuk mendalami program ini dengan mengangkat judul “Efektivitas Layanan Pelaporan Pelanggaran Melalui Website Whistleblowing System pada Pemerintah Kabupaten Wajo” pada penelitian ini.

## **1.2 Kesenjangan Masalah**

Korupsi saat ini sudah membudaya di Indonesia, hal ini sudah menjadi fakta yang tidak dapat kita hindari. Melihat kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut membuat Indonesia harus berusaha untuk memberantasnya. Selain dengan menindak tegas pelaku, mencegah juga merupakan salah satu untuk mempersempit celah praktik korupsi. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan membangun sistem pelaporan pelanggaran. Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo 70 tahun 2022 tentang Sistem Pelaporan Penyelenggaraan. Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo membuat sistem pelaporan pelanggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan membangun website whistleblowing system Kabupaten Wajo. Hal ini membuktikan keseriusan dari pemerintah daerah dalam mencegah pelanggaran yang menjurus pada praktik korupsi dengan membangun suatu layanan pelaporan pelanggaran yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pelaporan. Fenomena ini menjadi minat peneliti untuk memfokuskan permasalahan terkait bagaimana efektivitas layanan pelaporan pelanggaran melalui website whistleblowing system pada pemerintah daerah Kabupaten Wajo.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Sumarno sulistio (2019) Penerapan Whistleblowing System dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran. Dengan hasil Penerapan Whistleblowing system pada PT Telekomunikasi Indonesia dan Pertamina sudah berjalan dengan baik. (sulistio, 2019)

Kedua, Tiara Mega (2020) Pengaruh Whistleblowing System, Pencegahan Pelanggaran, dan Perilaku Etis Terhadap Loyalitas Karyawan. Whistleblowing system, perilaku etis, dan pencegahan pelanggaran berpengaruh terhadap loyalitas karyawan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) Kabupaten Sragen. (Mega, 2020)

Ketiga, laib muhammad silean (2021) Sistem Pengelolaan Laporan Pengaduan Pelanggaran Internal Organisasi Berbasis Web Mobile. Dengan hasil Sistem yang efektif dan efisien adalah sistem yang dapat membantu dan mempermudah untuk memberikan pengaduan serta mengelola laporan dan pengaduan. (silean, 2021)

Keempat, Aziz M.Pratama (2022) Efektivitas Whistleblowing System Internal. Dengan hasil Whistleblowing system pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan provinsi Riau berjalan dengan cukup efektif. (M.Pratama, 2022)

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya, penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, Sumarno sulistio (2019) Penerapan Whistleblowing System dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran. Perbedaan terdapat pada pembahasan Whistleblowing system pada skripsi ini membahas seluruh pintu untuk pelaporan dan lokasi penelitian di PT Telekomunikasi Indonesia dan Pertamina.

Kedua, Tiara Mega (2020) Pengaruh Whistleblowing System, Pencegahan Pelanggaran, dan Perilaku Etis Terhadap Loyalitas Karyawan. Perbedaan terdapat pada pembahasan lebih terfokus kepada pengaruh dari Whistleblowing System pada karyawan.

Ketiga, laib muhammad silean (2021) Sistem Pengelolaan Laporan Pengaduan Pelanggaran Internal Organisasi Berbasis Web Mobile. Perbedaan terdapat pada fokus pembahasan yaitu pembangunan web mobile untuk pelaporan.

Keempat, Aziz M.Pratama (2022) Efektivitas Whistleblowing System Internal. Perbedaan terdapat pada fokus pembahasan yaitu sistem pelaporan pelanggaran terkhusus bagi internal organisasi.

## **1.5 Tujuan**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pencapaian tujuan dari pelaksanaan website whistleblowing system Kabupaten Wajo, Untuk mengetahui bagaimana integrasi pelaksanaan program website whistleblowing system Kabupaten Wajo, Untuk mengetahui bagaimana dalam pelaksanaan program website whistleblowing system Kabupaten Wajo.

## **II. METODE**

Penulis memilih melakukan penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian, akan menjadi landasan sebagai petunjuk arah penelitian agar fokus penelitian sesuai pada fakta yang terdapat pada lapangan (Nurdin I. &, 2019). Penulis menggunakan Teori Efektivitas Steers (Steers, 1985).

Informan pada penelitian ini ada 4 orang. Teknik yang digunakan untuk menentukan narasumber/informan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling (Sugiyono, 2013). Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. ada tiga macam teknik pengumpulan data atau informasi, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Teknik analisis data menggunakan teori dari Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, pengumpulan data dan Penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2013).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Efektivitas dari sistem pelaporan pelanggaran melalui website**

#### **a. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit. Dalam konteks penelitian ini, dimensi pencapaian tujuan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam program website whistleblowing system.

#### **i. Kurun Waktu**

Selama dua tahun beroperasinya website whistleblowing system dari tahun 2021 hingga 2022 ini hanya menerima satu laporan pelanggaran yang berupa laporan pelanggaran pungutan liar. Menurut penjelasan Ibu Upi selaku pegawai staf bagian perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Pada hari Senin, 8 Januari 2023.

“Seluruh laporan yang masuk tersebut berasal dari surat yang masuk, dan untuk dari website masih belum ada”.

Berdasarkan pernyataan beliau, peneliti dapat menyimpulkan bahwa laporan yang ditampilkan pada halaman website whistleblowing system yang sudah dijelaskan pada latar belakang tersebut bukan merupakan laporan dari website secara langsung namun berasal dari surat yang masuk ke Inspektorat Daerah. Selama program website ini berjalan, ada juga dugaan



korupsi yaitu dugaan korupsi perjalanan dinas Bappelitbangda pada tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa masih ada kasus dugaan korupsi yang terjadi pada lingkup pemerintahan Kabupaten Wajo namun masih belum masuk melalui website whistleblowing system. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun masih belum adanya laporan pelanggaran yang masuk melalui website whistleblowing system.

## ii. Target

Menurut penjelasan bapak Saktiar, S.Sos, M.Si selaku Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Pada hari Senin, 8 Januari 2023.

“Tujuan dari dibuatnya website ini adalah untuk mencegah dan mengantisipasi proses pelanggaran yang terjadi pada lingkungan pemerintah Kabupaten Wajo”.

Berdasarkan jumlah laporan yang masuk ke Inspektorat menunjukkan bahwa website ini masih belum berhasil untuk mencegah dan mengantisipasi pelanggaran yang ada pada Kabupaten Wajo karena belum adanya laporan pelanggaran yang masuk

## iii. Dasar Hukum

Website sistem pelaporan pelanggaran Kabupaten Wajo dapat digunakan baik oleh pihak internal pemerintah maupun dari pihak eksternal. Menurut penjelasan bapak Saktiar, S.Sos, M.Si selaku Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Pada hari Senin, 8 Januari 2023 pukul 09.30 wita.

“Website WBS ini kami buat dengan landasan Peraturan Bupati Wajo Nomor 70 tahun 2021, dengan target untuk pihak internal dari pemerintah sendiri dan juga untuk eksternal dari pemerintah seperti masyarakat. Namun untuk sekarang kami masih lebih fokus untuk memperkenalkan website ini kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Wajo terlebih dahulu.”

Berdasarkan pernyataan beliau, peneliti dapat mengetahui bahwa pelaksanaan website ini beroperasi berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 20 tahun 2021.

## b. Intergritas

Menurut Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Yudi Rafial Hadi, F, S.Sos,M.Si sebagai admin pengelola website, mengatakan bahwa :

“Sosialisasi Website WBS sebagai sistem pelaporan sudah pernah dilaksanakan. Terkait dengan pelaksanaannya kami mengundang seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Wajo”.

Berdasarkan informasi dari Kasubag Perencanaan diatas, serta memperhatikan dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi website WBS dimana kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh Inspektorat dengan mengundang seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Wajo dan dihadiri oleh 33 (tigapuluh tiga) orang sebagaimana tercantum dalam absensi yang dilampirkan. Intensitas dari sosialisasi juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pemahaman dari pelapor terkait dengan kemauan untuk berpartisipasi dalam program. Hal ini juga dijelaskan oleh Yudi Rafial Hadi bahwa :

“Sosialisasi website ini hanya dilakukan sekali dengan harapan agar peserta yang hadir dapat menjelaskan tujuan dan manfaat dari website ini kepada perangkat daerahnya masing masing. Sosialisasi ini merupakan hal yang sangat berpengaruh agar para pegawai dapat memahami tujuan dan manfaat dari website ini.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo adalah dengan harapan setelah menjelaskan tujuan dari WBS, para peserta dapat kembali melakukan sosialisasi kepada perangkat daerahnya masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa sosialisasi yang dilaksanakan masih belum maksimal dikarenakan sosialisasi yang baik adalah sosialisasi yang berhasil membangun komunikasi dua arah agar pelapor dapat memahami manfaat dan tujuan dari pelaksanaan program tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan intensitas sosialisasi yang terhitung kurang dan jumlah laporan yang diterima oleh Inspektorat selama tiga tahun terakhir hanya terdapat satu laporan yang melalui website WBS.

### **c. Adaptasi**

Menurut penjelasan bapak Saktiar, S.Sos, M.Si selaku Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.

“Bapak Yudi saya pilih sebagai admin dikarenakan diantara pegawai yang ada pada inspektorat ini, beliau yang memiliki pengetahuan tentang pengoperasian website lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Saya tidak mengadakan seleksi secara khusus dikarenakan beliau adalah orang yang pernah menjabat sebagai kepala bidang di Diskominfo dan menurut saya beliau juga memiliki integritas yang tinggi sehingga dapat saya percayakan kepada beliau”

Berdasarkan pernyataan beliau, peneliti dapat mengetahui bahwa pemilihan yang dilakukan oleh inspektur hanyalah berdasarkan riwayat kerja dari bapak Yudi dan semata-mata hasil observasi beliau. Penilaian tersebut tidak dapat menjamin bahwa bapak Yudi memiliki kapabilitas yang tepat untuk mengoperasikan website tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang saya lihat di Inspektorat Daerah, Bapak Yudi terlihat lebih paham tentang teknologi informasi dibandingkan dengan pegawai yang lainnya. Namun, beliau memiliki terlalu banyak kesibukan selain pekerjaan yang ada di kantor sehingga beliau jarang terlihat untuk waktu yang lama pada saat hari kerja. Hal tersebut juga berdampak pada pengoperasian website whistleblowing system, memang laporan pengaduan pelanggaran tidak akan masuk setiap harinya akan tetapi dalam hal pengawasan beliau hanya mengecek website tersebut pada saat peneliti melakukan penelitian. Pengawasan website tidak hanya semata-mata mengecek laporan yang masuk dan tidak, tindakan perawatan dari website juga termasuk dari tindakan pengawasan. Salah satu contohnya adalah melakukan maintenance pada website tersebut. Kegiatan maintenance adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperpanjang daya guna dari website agar kualitas dari website tersebut dapat terjaga. Hal tersebut dilakukan dengan berkoordinasi kepada pihak yang membuat website tersebut. Kegiatan tersebut juga dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga keamanan dari website whistleblowing system. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengetahui bahwa kegiatan pengawasan tersebut masih sangat kurang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

## **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian sebelumnya akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

Pertama, Sumarno sulistio (2019) Penerapan Whistleblowing System dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran. Kebaharuan penelitian terletak pada pemilihan yang dilakukan oleh inspektur hanyalah berdasarkan riwayat kerja dari bapak Yudi dan semata-mata hasil observasi beliau. Penilaian tersebut tidak dapat menjamin bahwa bapak Yudi memiliki kapabilitas yang tepat untuk mengoperasikan website tersebut.



Kedua, Tiara Mega (2020) Pengaruh Whistleblowing System, Pencegahan Pelanggaran, dan Perilaku Etis Terhadap Loyalitas Karyawan. Kebaharuan penelitian terletak pada pengoperasian website whistleblowing system, memang laporan pengaduan pelanggaran tidak akan masuk setiap harinya akan tetapi dalam hal pengawasan beliau hanya mengecek website tersebut pada saat peneliti melakukan penelitian. Pengawasan website tidak hanya semata-mata mengecek laporan yang masuk dan tidak, tindakan perawatan dari website juga termasuk dari tindakan pengawasan. Salah satu contohnya adalah melakukan maintenance pada website tersebut.

Ketiga, laib muhammad silean (2021) Sistem Pengelolaan Laporan Pengaduan Pelanggaran Internal Organisasi Berbasis Web Mobile. Kebaharuan penelitian terletak pada Kegiatan maintenance adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperpanjang daya guna dari website agar kualitas dari website tersebut dapat terjaga. Hal tersebut dilakukan dengan berkoordinasi kepada pihak yang membuat website tersebut. Kegiatan tersebut juga dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga keamanan dari website whistleblowing system.

Keempat, Aziz M.Pratama (2022) Efektivitas Whistleblowing System Internal. Kebaharuan penelitian terletak pada bahwa tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo adalah dengan harapan setelah menjelaskan tujuan dari WBS, para peserta dapat kembali melakukan sosialisasi kepada perangkat daerahnya masing-masing.

#### IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan peneliti terkait dengan fokus masalah yang diteliti pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari Dimensi Pencapaian Tujuan, peneliti menyimpulkan bahwa : Website whistleblowing system sudah berjalan dengan landasan hukum yang jelas, namun masih belum efektif karena pada pencapaian target pelaksanaan website whistleblowing system ini masih belum menjadi pilhan terbaik untuk dijadikan tempat pengaduan dikarenakan meskipun adanya laporan pelanggaran yang ditangani oleh Inspektorat tetapi pelanggaran tersebut berasal dari pintu lain meskipun website whistleblowing system sudah berjalan dua selama tahun.
2. Dari Dimensi Integrasi, peneliti menyimpulkan bahwa : Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo kurang memberi perhatian pada kegiatan proses sosial dikarenakan Inspektorat hanya melakukan kegiatan sosialisasi sebanyak satu kali saja.
3. Dari Dimensi Adaptasi, peneliti menyimpulkan bahwa : Pada peluncuran website ini, Inspektorat belum mematangkan persiapannya dengan baik dikarenakan informasi jaminan keamanan pelapor masih belum tertera pada website, admin dari website masih belum memenuhi kabapilitas sebagai penanggung jawab pengoperasian, dan kedudukan dari Inspektorat belum independen sehingga efektivitas penerapan website belum optimal sesuai tujuannya.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data yaitu dalam observasi, dokumentasi dan wawancara.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapakan penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- M.Pratama, A. (2022). Efektivitas Whistleblowing System Internal. .
- Mega, T. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Pencegahan Pelanggaran, dan Perilaku Etis Terhadap Loyalitas Karyawan.
- Nurdin, I. &. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- silean, l. m. (2021). Sistem Pengelolaan Laporan Pelanggaran Internal Organisasi Berbasis Web Mobile.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi: Kaidah Tingkah Laku*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- sulistio, s. (2019). Penerapan Whistleblowing System dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran.

